

EFEKTIVITAS PENCAIRAN DANA, PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

Fitria Nengsih, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Effectiveness of Fund Management, Employee Salary Payment. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the management of funds, especially salaries made by the Department of Education and Culture of Meranti Regency. Research conducted in the District of Meranti Islands with research subjects are treasurer Department of Education and Culture and Treasurer UPTD Kepulauan District Meranti. This research use descriptive qualitative approach. Instruments used to collect data using interview techniques, observation and documentation. Based on the results of the research can be seen that the treasurer salary and treasurer UPTD in the payroll employee salaries provide a good impact and a real change for employees Education and culture district meranti archipelago.

Keywords: effectiveness, fund management, salary payroll

Abstrak: Efektivitas Pengelolaan Dana, Pembayaran Gaji Pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas pengelolaan dana khususnya gaji yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian di lakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan subyek penelitiannya adalah bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bendahara UPTD Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD dalam pembayaran gaji pegawai tersebut memberikan dampak yang baik maupun adanya perubahan nyata bagi pegawai Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti.

Kata kunci: efektivitas, pengelolaan dana, pembayaran gaji pegawai

PENDAHULUAN

Tujuan kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menghadapi berbagai masalah yang terjadi. Maka, berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan perlu dikenali sehingga diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem, yang tujuannya untuk mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri.

Banyak faktor yang mempengaruhi atas kemajuan maupun kemunduran suatu Negara. Salah satu faktor tersebut adalah

berkaitan dengan keberadaan dan peran Sumber Daya Manusia. Karena tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas (kompeten serta mumpuni), suatu negara tidak akan mengalami suatu kemajuan dan akan kalah bersaing dengan negara – negara lainnya. Demikian juga halnya di dalam suatu organisasi baik itu entitas ekonomi *Profit oriented* maupun *non – profit oriented* (contohnya organisasi sektor publik), sumber daya manusia yang berkualitas merupakan komponen penting dalam mendukung seluruh kegiatan operasional di dalam perusahaan / organisasi tersebut. Perusahaan / organisasi yang baik yaitu perusahaan / organisasi yang selalu memperhatikan kinerja organisasi maupun

kinerja pegawainya.

Keberadaan sumber daya manusia ini sudah seharusnya mendapat perhatian utama pimpinan perusahaan / organisasi. Perhatian utama pimpinan yang dimaksud adalah berupa imbalan atau penghasilan. Sudah seharusnya imbalan atau penghasilan yang diperoleh oleh pegawai memadai dan sesuai dengan bobot resiko dari pekerjaan yang dikerjakannya. Hal ini sebagai penyeimbang antara kinerja serta produktivitas pegawai dengan apresiasi (gaji) yang diberikan perusahaan / organisasi, sehingga tidak timbul rasa ketidakadilan pada pegawai.

Manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan yang biasanya diberikan dalam bentuk kompensasi disebut gaji. Seseorang akan menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan setiap bulan.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 19 Desember 2009, dan pada tanggal 16 Januari 2009 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2009 resmiah berdiri Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Ibu Kota Selatpanjang. Tujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Meranti adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Tipologi Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 4 pulau besar yaitu pulau Merbau, pulau Rangsang, pulau Tebing Tinggi dan pulau Padang dengan luas keseluruhan sebesar 5.532,52 KM² yang terdiri dari daratan seluas 3.714,19 KM² dan lautan seluas 1.818,33 KM².

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" – 1° 28' 0" LU dan 102° 12' 0" BT dan terletak pada dibagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai

yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia – Malaysia – Singapura (IMS-GT) dan secara tidak langsung telah menjadi daerah Hinterland kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial sebagai gerbang lintas batas Negara/pintu gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai Pusat kegiatan strategis Negara yaitu sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang Internasional, niaga dan industri.

Jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 239 sekolah yang terdiri dari 171 sekolah SD, Berdasarkan data tahun 2014, jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT dan guru yang mengajar di Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 2.027 orang.

Jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 226 pegawai yang terdiri dari pegawai PNS sebanyak 149 orang dan pegawai Non PNS sebanyak 77 orang. Dari beberapa dinas dan UPTD banyaknya pegawai PNS terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebanyak 69 orang.

Jumlah guru di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 3.482 guru yang terdiri dari 2.028 orang guru SD, 814 orang guru SMP, 477 orang guru SMA dan 163 guru SMK.

Pada umumnya, orang mengenal sistem pemberian gaji kepada pegawai itu secara manual (sederhana). Pemberian gaji secara manual (sederhana) ialah baik dari hal penerimaan gaji, kenaikan pangkat atau golongan, sampai kepada akhir masa jabatan pegawai tersebut masih dilakukan dengan pencatatan ke buku secara manual

(sederhana). Tidak sedikit organisasi/perusahaan yang masih menganut sistem penggajian manual tersebut.

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Tebing Tinggi, Tebing Tinggi barat, Tebing tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau merbau, dan Tasik Putri Puyuh. Dimana UPT tersebut merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Guru yang mengajar pada kecamatan tersebut dapat mengambil gaji melalui UPT pada kecamatan masing masing ditempat mereka mengajar.

Berdasarkan survey awal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan khususnya dalam proses pembayaran gaji pegawai pada UPT tersebut tidak pernah dianggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selama ini biaya yang dikeluarkan oleh UPT pada kecamatan diluar kota Kabupaten Kepulauan Meranti diambilkan dari biaya operasional UPT dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Pada saat pengambilan gaji yang dilakukan oleh bendahara gaji UPT sangat beresiko tinggi dimana bendahara pembantu UPT datang sendiri ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Meranti dalam pengambilan cek untuk dicairkan ke Bank Kas Daerah dimana Kas Daerah kita yaitu Bank Riau dan melakukan pencairan cek gaji dan mengambil tunai uang gaji tersebut untuk dibawa langsung ke UPT. Hal ini dilakukan sendiri oleh bendahara UPT tanpa menggunakan pengawalan atau menggunakan tenaga polisi sebagai penjagaan dan pengawalan.

Proses pengelolaan dana oleh bendahara pembantu UPT ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti menghabiskan dua hari dalam pengurusan gaji sampai bendahara tersebut kembali lagi ke UPT. Meskipun bendahara pembantu pada UPT telah tiba, tetapi pem-

bayaran gaji tidak dapat langsung diberikan dikarenakan pembayaran gaji masih menggunakan sistem manual maka uang tersebut diamplopkan satu demi satu sesuai dengan rincian amprah masing masing pegawai. Selain itu, karen amasih manual maka bendaha pembantu perlu teliti agar tidak salah bayar atau selisih bayar, karena jika salah bayar akan menjadi tanggung jawab dari bendahara pembantu. Dengan demikian gaji pegawai mengalami keterlambatan karena gaji tidak dapat diberikan secara tepat waktu yaitu pada awal bulan.

Pemberian gaji yang masih menggunakan sistem manual masih sangat mengganggu masalah pembayaran gaji berbeda dengan jika menggunakan komputerisasi. Pemberian gaji menggunakan sistem komputerisasi adalah segala hal yang berkaitan dengan transaksi penggajian sudah dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem yang mengatur kegiatan penggajian ini disebut sebagai sistem akuntansi penggajian. Sudah banyak organisasi/perusahaan yang sudah menganut sistem komputerisasi dalam proses pemberian gajinya (penggajian), salah satunya dinas atau instansi-instansi pemerintah seperti contoh dinas pendidikan dan kebudayaan yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam proses pencairan gaji untuk pegawai negeri sipil (PNS) nya . Sistem yang digunakan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)*

Di dalam sistem SIPKD penggajian terdapat kebijakan yang mengatur segala sesuatu mengenai penggajian, prosedur atau tata cara pemberian gaji, dokumen yang terkait yang dijadikan sebagai bukti, fungsi-fungsi atau bagian-bagian yang terlibat di dalam kegiatan penggajian serta pengendalian intern atas kegiatan penggajian tersebut, sehingga seluruh aktivitas yang berlangsung terstruktur dan terintegrasi serta mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi keluar dari sistem yang telah dibuat.

Sejak tahun 2013 Kabupaten kepulauan meranti telah menggunakan aplikasi

SIPKD.dalam pembuatan, pengimputan maupun pelaporan keuangan. Namun dalam pembayaran gaji khususnya pada UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti masih dilakukan secara manual atau tunai. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembayaran gaji maupun pembayaran lainnya merupakan tugas pokok bendahara gaji.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian maka pertanyaan adalah bagaimana efektifitas pengelolaan dana dalam pembayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti “

Menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2007). Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut Devas, dkk., (1989) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah – rendahnya dan dalam waktu yang secepat – cepatnya.

Dalam mengukur efektifitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator yaitu:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata (Sutrisno, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pencairan dana pem-

bayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informan penelitian bendahara gaji, pegawai dan UPTD Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Efektifitas pengelolaan dana gaji

Pemahaman program yang dimaksud adalah sejauh mana pegawai memahami mekanisme dari pengelolaan dana khususnya gaji pegawai. Biasanya gaji pegawai dikotakota besar menggunakan system komputerisasi dan langsung ditransfer ke masing-masing rekening pegawai. Tetapi berhubungan di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang jauh dari jangkauan internet dan tidak adanya bank disana, maka menyulitkan pemerintah dalam membagi gaji pegawai.

Sebagai pegawai yang diamanatkan untuk mengelola gaji pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka pegawai tersebut harus mengerti dengan mekanisme seperti apa dalam pengelolaan dana gaji pegawai yang jauh dari jangkauan internet maupun yang lainnya.

Tepat sasaran yang dimaksud adalah pegawai yang mengelola gaji pegawai memiliki pendidikan yang sesuai karena harus mengurus masalah gaji pegawai yang jauh dari jangkauan internet maupun fasilitas lainnya.

Pegawai tersebut dapat mengelola pembayaran gaji pegawai sesuai dengan ketentuan atau aturan proses pengelolaan

dana. Ketentuan atau aturan pengelolaan dana sangatlah banyak yang ditempuh karena pegawai bendahara itu sendiri yang menjemput uang gaji pegawai ke pusat. Hal ini dilakukan karena masih menggunakan sistem manual dan tidak adanya bank di daerah tersebut.

Penggunaan waktu dalam proses pengajuan sampai pada proses pembayaran gaji pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilaksanakan oleh pegawai bendahara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar gaji pegawai tepat waktu diberikan kepada pegawai.

Meskipun gaji pegawai setiap bulannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tetapi pegawai bendahara telah berusaha agar tidak mengalami keterlambatan yang berkepanjangan. Hal tersebut sangat dimaklumi oleh seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk tepat waktu.

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pendapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target.

Berdasarkan data informan dapat diketahui bahwa tujuan yang diharapkan telah tercapai yaitu terlihat dari pengelolaan dana pembayaran gaji Bendahara gaji Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti menyerahkan cek dan amprah gaji kepada bendahara UPTD dan menandatangani kwitansi pembayaran gaji oleh bendahara UPTD. Setelah mendapatkan cek dari bendahara gaji pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti, bendahara UPTD langsung ke Bank Kas daerah untuk melakukan pencairan cek untuk pembayaran gaji pegawai UPTD, bendahara UPTD membawa uang

tunai ke UPTD untuk melakukan pembayaran gaji pada pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada sebahagian besar pegawai yang sudah memiliki rekening bank pada Kas Umum daerah dan bisa melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening pegawai untuk pembayaran gajinya, namun masih ada pegawai yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disebabkan jauhnya Bank Kas Umum daerah dari tempat kerja mereka.

Perubahan nyata yang dimaksud adalah adanya pembayaran gaji kepada pegawai dan memberikan dampak yang baik terhadap pegawai itu sendiri. Pegawai tersebut dapat menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan dari data informan dapat diketahui bahwa setelah dari Kas Umum daerah, bendahara UPTD membawa uang tunai ke UPTD untuk melakukan pembayaran gaji pada pegawai Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada sebahagian besar pegawai yang sudah memiliki rekening bank pada Kas Umum daerah dan bisa melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening pegawai untuk pembayaran gajinya, namun masih ada pegawai yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disebabkan jauhnya Bank Kas Umum daerah dari tempat kerja mereka. Namun, meskipun tidak ada bank tetapi gaji pegawai tetap diberikan secara langsung melalui amplop dan sesuai dengan gaji masing-masing.

Kendala dalam pengelolaan dana

Kendala yang dihadapi bendahara Gaji pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bendahara UPT Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah berkaitan dengan pencairan dana yang mengalami kendala berarti misalnya akses jalan yang tidak memungkinkan. Pembayaran gaji tidak dapat diberikan tepat waktu, sistem pembayaran gaji yang masih manual, memerlukan biaya tambahan untuk proses pencairan gaji dari

penyerahan berkas sampai pencairan gaji, resiko keamanan ketika membawa uang gaji secara tunai Dinas ke masing-masing UPT.

PEMBAHASAN

Pengelolaan dana pembayaran gaji jika dikelola dengan baik dan benar serta sesuai aturan, maka tidak akan mengalami masalah dan dapat cair dengan segera serta dapat dibagikan dengan cepat kepada pegawai. Selain itu pemahaman program dari pemerintah juga harus dimiliki oleh setiap pegawai bendahara. Jadi, pegawai tersebut harus mengerti dengan pendidikan berkaitan dengan keuangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Umar (2003) yang mengemukakan 5 definisi yang menentukan kualitas jasa dan salah satu faktor dari 5 definisi tersebut adalah reability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji ketika ditawarkan, dan juga S.P Siagian (1978) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola dana gaji pegawai sesuai dengan aturan yang sudah dipelajari sebelum bekerja. Aturan tersebut merupakan langkah-langkah dalam pengajuan gaji sampai memberikan gaji tersebut kepegawai baik secara manual maupun komputerisasi

Pengelolaan dana jika tidak dikerjakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi berkaitan dengan keuangan dengan baik, maka tidak akan tercapai dengan baik.

Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berusaha mengelola dana gaji pegawai sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi keterlambatan yang terlalu lama. Karena dalam mengelola dana gaji pegawai harus melewati beberapa tahapan.

Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai dilaksanakan dengan secepatnya, agar tidak terjadi keterlambatan yang terlalu lama. Karena banyaknya

tahapan yang perlu dilalui oleh bendahara agar dan a tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah itu bendahara melakukan penjemputan uang gaji.

Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berusaha mencapai tujuan dari pemerintah untuk segera memberikan gaji pegawai dengan melalui tahapan yaitu waktu pelaksanaan proses pencairan dana dilakukan dengan cepat, meskipun adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamatan.

Pengelolaan dana pembayaran gaji dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu setiap bulannya memberikan gaji dari hasil kerjanya. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui beberapa tahapan agar tidak terjadi keterlambatan yang terlalu lama. Di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memanglah sangat tidak memungkinkan akan mendapatkan gaji sesuai waktu yang ditentukan yaitu awal bulan. Karena jauhnya kondisi daerah dari sarana internet maupun bank.

Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perubahan nyata kepada setiap pegawai dengan memberikan gaji pegawai yang telah dicairkan dari pemerintah pusat melalui beberapa tahapan

Pengelolaan dana pembayaran gaji jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang baik kepada seluruh pegawai. Hal ini dikarenakan gaji merupakan tumpuan utama tiap pegawai untuk memberi nafkah keluarganya. Jika gaji tersebut tidak diberikan maka kelangsungan hidup tidak akan berjalan dengan lancar dan pegawai akan tidak termotivasi untuk bekerja lebih baik. Walaupun pemberian gaji mengalami keterlambatan tetapi seluruh pegawai memaklumi itu karena kondisi daerah yang tidak memungkinkan untuk menerima gaji dengan tepat waktu.

Kendala dalam pengelolaan dana

Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan

Meranti mengalami kendala dalam memberikan gaji pegawai karena bendahara dinas harus menunggu usulan gaji dari tiap UPTD baru dapat memprosesnya.

Jika dalam pengelolaan dana pegawai tidak mengalami kendala, maka gaji pegawai akan diterima tepat waktu oleh seluruh pegawai baik di pelosok. Tetapi karena akses jalan yang tidak memungkinkan, kepada pegawai tidak dapat diterima dengan tepat waktu oleh seluruh pegawai.

SIMPULAN

Pemahaman Program. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD dapat memahami mekanisme pengelolaan dana khususnya gaji pegawai. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD sudah mendapatkan pendidikan atau sosialisasi mengenai ketentuan atau aturan proses pengelolaan dana khususnya gaji pegawai pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti. Bendahara gaji dan bendahara UPTD telah menggunakan waktu dalam proses pengajuan sampai pada proses pembayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabu-

paten Kepulauan meranti dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tercapainya tujuan dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD telah melakukan pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui pembayaran gaji pegawai pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti. Perubahan nyata dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD dalam pembayaran gaji pegawai tersebut memberikan dampak yang baik maupun adanya perubahan nyata bagi pegawai Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti.

DAFTAR RUJUKAN

- Devas, Nick, Et, Al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Sutrisno, 2007, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia
- Bodnar, 2000, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat
- Umar, 2003, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka